



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA  
BUKITTINGGI**

**Oleh:**

**DECRY WILARSYAH  
05 951 029**

**Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG  
2011**

	No.Alumni Universitas	DECRY WILARSYAH	No.Alumni Fakultas
<b>BIODATA</b>			
a). Tempat/Tgl lahir: Lirik/10 Oktober 1987 b). Nama Orang Tua: Darlis dan Yusni Kasim c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No. BP: 05 951 029 f). Tgl Lulus: 19 Januari 2011 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 2,76 i). Lama Studi: 5 tahun 4 bulan j). Alamat Orang Tua: Komp. SMPN 1 Talang Ubi Pendopo Sumatera Selatan.			

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI**

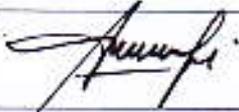
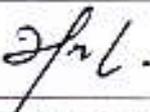
*Skripsi SI Oleh: Decry Wilarsyah*

*Pembimbing: Drs. Amra Ausri*

**Abstrak**

Kota Bukittinggi merupakan kota wisata di Sumatera Barat, yang memiliki aset kekayaan yang besar dan memiliki masyarakat yang sadar akan kewajibannya dalam menunjang pembangunan kota Bukittinggi yaitu dengan membayar pajak bumi dan bangunan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Bukittinggi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, *pertama* faktor wajib pajak, wajib pajak akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan suatu kota tersebut. Kota Bukittinggi merupakan kota yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. *Kedua* faktor Efektifitas pemungutan pajak, yang mengatur hubungan antara hasil pungut pajak dengan potensi pajaknya. Efektifitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. *Ketiga faktor* Efisiensi, yang mana menunjukkan hubungan yang negatif antara realisasi pajak dengan penerimaan di Kota Bukittinggi. Artinya, semakin tinggi efisiensi pajak maka semakin rendah realisasi penerimaan. Dari ketiga faktor diatas, faktor yang paling dominan adalah wajib pajak, kemudian faktor efektifitas pemungutan pajak dan yang terakhir yaitu faktor efisiensi pemungutan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa faktor wajib pajak, efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak merupakan faktor atau variabel yang sangat kuat dalam menentukan penerimaan pajak bumi bangunan di Kota Bukittinggi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Januari 2011. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan	1. 	2.	3. 
Nama Terang	Drs. Amra Ausri	Sri Maryati, SE. M.Si	Drs. Zulkifli N, M.Si

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi: **Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec,DEA,Ing**  
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tujuan umum dan akhir dari usaha pembangunan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dalam kacamata daerah, tujuan pembangunan yang dilakukan di daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan aspirasi penduduk di daerah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi adalah penting bagi negara-negara yang ada didunia, untuk itulah setiap negara di dunia akan berusaha untuk mengejar pembangunan ekonomi tersebut. Untuk negara berkembang pembangunan itu pada akhirnya akan berusaha untuk mengurangi dari ketergantungan terhadap negara maju. Selanjutnya pembangunan ekonomi pada dasarnya terjadi apabila terdapat kenaikan produksi dan pendapatan nasional perjiwa rata-rata yang terjadi selama waktu cukup panjang dan dapat memperbaiki taraf hidup rakyat. (Kamaludin:1978; 13)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu komponen penting dari pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengusahakan pembangunan tersebut tercapai sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu dapat dinikmati

secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan peralatan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah : (1) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, (2) mencapai stabilitas perekonomian daerah, (3) membangun basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beraneka ragam. Dari tujuan ekonomi di atas peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan (Jamli 1996:8). Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan kebijakan-kebijakan seperti peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat sebagai hasil dari pembangunan yang dilakukan maka diperlukan ukuran atau indikator. Salah satu indikator kinerja regional yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan pemerintah di daerah dalam menjalankan peranan dan fungsi pemerintah di daerah adalah besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut.

Salah satu penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri adalah pajak. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1989). Salah satu jenis pajak tertua yang paling banyak ditarik di Indonesia adalah pajak bumi dan bangunan

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab – bab sebelumnya serta penelitian yang dilakukan terhadap factor – factor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Kota Bukittinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel wajib pajak, efektifitas pajak, dan efisiensi pajak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB di Kota Bukittinggi.
2. Jumlah Wajib Pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Pada umumnya mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir (2000 – 2009) dimana rata – rata sebesar 23.226.5 orang pertahun.
3. Efektifitas pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi, ini menunjukkan sudah efektif walau belum bisa dijadikan acuan karena dalam penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang sebenarnya tapi berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
4. Efisiensi pajak mempunyai hubungan yang negatif tapi signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Bukittinggi. Ini menunjukkan efisiensi pemungutan PBB belum efisien disebabkan karena setiap tahunnya terjadi peningkatan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, hamdan. 1993. *Perpajakan*, Jakarta ; Bumi Aksara.
- BPS. Beberapa Tahun Terbitan. *Bukittinggi dalam angka*, Penerbit Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
- Barata, Atep Adya. 1992. *Pajak Bumi dan Bangunan*, CV.Amigo, Jakarta ; CV. Amigo.
- Brotodiharja R, Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung ; PT. Refika Aditama.
- Devas, Nick. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI-Press.
- Dipenda. 2002. *Kota Bukittinggi, Sepuluh Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi*. Bukittinggi.
- Faulina, Merlin. A S. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Periode 2001.01-2005.06 Dengan Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Error Correction Model*" Bandung.
- Gade Muhammad, Gade Djamaluddin. 1995. *Hukum Pajak*, Fakultas Ekonomi/Universitas Indonesia.
- Lubis Irwansyah, SE.,M.Si. juni 2009. *Buku Manajemen Dan Analisis Memudahkan Urusan Pajak*. Jakarta: PT Flex Media Komputindo, 266 hal.